

- *BUDGET DEFICIT*
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- *ECONOMIC DEVELOPMENT*

KK
C 53/03
Azi
a

**ANALISIS KEBIJAKAN DEFISIT APBN TAHUN
ANGGARAN 1997 / 1998 - 2002 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**



Diajukan Oleh

**AZRULI MUKHTI AZINAR
No. Pokok : 049715557**

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN DEFISIT APBN TAHUN
ANGGARAN 1997/1998 – 2002 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA**

DIAJUKAN OLEH :

AZRULI MUKHTI AZINAR

No. Pokok : 049715557

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



Drs. Ec. H. ACHMADI, MS

TANGGAL 19-8-2003

KETUA PROGRAM STUDI,



Dra. Ec. Hj. SRI KUSRENI, M.Si

TANGGAL 19-08-2003

Surabaya, 3 Juni 2003

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



Drs. Ec. H. ACHMADI, MS

ABSTRAKSI

Skripsi ini menerangkan mengenai kondisi defisit APBN yang diimplikasikan dengan pertumbuhan ekonomi selama periode tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan 2002. Besarnya defisit anggaran ini disebabkan oleh besarnya pengeluaran pemerintah dibanding dengan penerimaannya sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di dalam skripsi ini dipengaruhi oleh pendapatan nasional, pendapatan per kapita, dan jumlah penduduk.

Sesuai dengan judul skripsi ini, juga menekankan tentang kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi permasalahan defisit dalam APBN dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan 2002. Kebijakan yang diambil pemerintah adalah kebijakan yang bersifat kontraktif yaitu kebijakan pemerintah yang ingin memperbesar penerimaan negara dan mulai menghemat pengeluarannya. Kebijakan pemerintah untuk menghemat pengeluarannya misalnya dilakukan dengan mengurangi subsidi BBM, menunda proyek-proyek yang berdana besar, dan sebagainya. Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah mulai mengintensifkan penerimaan dari sektor pajak dan mencari alternatif penerimaan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).